

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja bukan penerima upah 2024, penulis menyimpulkan :

1. Komponen Komunikasi dilakukan melalui berbagai media, namun sosialisasi tatap muka yang disesuaikan dengan skala kegiatan, lokasi dan sasaran dianggap lebih efektif, serta penggunaan WA Blasting dan aplikasi JMO digunakan untuk pembaruan informasi. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat dan ketiadaan struktur organisasi. Meski penjelasan BPJS mudah dipahami, perubahan informasi yang tidak konsisten masih menjadi masalah.
2. Komponen Sumberdaya. Kuantitas SDM BPJS Ketenagakerjaan Jambi cukup memadai, tetapi kerja sama dengan berbagai pihak tetap diperlukan. Meskipun ada beberapa SDM yang tidak sesuai kompetensi. BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyesuaian dan pelatihan seperti orientasi, training serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap hari. Fasilitas yang ada sudah baik, namun jumlah meja pelayanan perlu ditingkatkan untuk mengatasi jumlah konsumen yang ramai.
3. Komponen Disposisi. Secara umum para petugas dinilai memberikan pelayanan dengan sikap ramah, sopan, dan berkomitmen untuk menyampaikan informasi secara jelas dan sesuai kebutuhan peserta. Namun terdapat catatan bahwa suasana hati petugas terkadang mempengaruhi kualitas interaksi, yang dapat menurunkan kenyamanan peserta. Kebijakan yang ada sudah cukup baik, namun iuran perlu disesuaikan dengan manfaat yang diterima peserta.
4. Komponen struktur birokrasi. SOP BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan implementasi program telah berjalan dengan baik tetapi kendala yang paling sering dihadapi peserta yaitu kelengkapan berkas dan keterlambatan klaim. Konsistensi informasi, pembaruan teknologi , serta

peningkatan pelatihan untuk petugas dan satpam masih perlu ditingkatkan. BPJS juga aktif bekerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintahan maupun swasta

5.2 Saran

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan

Disarankan agar BPJS Ketenagakerjaan memperkuat strategi komunikasi dan sosialisasi dengan media yang mudah diakses dan pendekatan yang sesuai karakteristik masyarakat. Evaluasi rutin terhadap implementasi program juga penting untuk meningkatkan layanan dan meminimalkan kendala pendaftaran maupun klaim. Pelayanan di kantor perlu ditingkatkan melalui penambahan meja layanan, pelatihan petugas, serta rekrutmen SDM secara bertahap. Kolaborasi dengan instansi terkait dan optimalisasi peran agen seperti Perisai dan BRI Link juga perlu diperkuat guna menjangkau pekerja informal.

2. Bagi Masyarakat

Disarankan untuk lebih proaktif dalam mencari informasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta memahami manfaat dan prosedurnya. Diharapkan para pekerja BPU dapat mempertimbangkan pentingnya perlindungan sosial dalam menjaga keberlangsungan ekonomi mereka dan keluarga di masa mendatang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan secara langsung untuk memahami pengalaman dan tantangan mereka secara lebih mendalam. Penelitian juga dapat difokuskan pada efektivitas layanan digitalisasi, termasuk hambatan teknologi seperti sinyal yang tidak stabil di wilayah pedesaan. Studi perbandingan antara implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di berbagai daerah dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik yang relevan bagi Kota Jambi.

4. Bagi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan disarankan untuk berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama

pekerja informal, mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mencegah kemiskinan akibat musibah kerja. Dinas juga dapat mendukung integrasi layanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akses cepat pelayanan terhadap medis dalam kasus kecelakaan kerja. Selain itu, Dinas Kesehatan dapat membantu pendataan pekerja informal yang belum terdaftar agar program jaminan sosial ini dapat mencakup lebih banyak masyarakat rentan.

5. Bagi Peminatan AKK

Bagi peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, disarankan untuk mengkaji kebijakan lintas sektor antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan guna menciptakan sinergi dalam perlindungan sosial. Penguatan kompetensi manajerial dalam pengelolaan jaminan sosial melalui pelatihan dan lokakarya perlu dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta.